

# Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Tabungan dan Investasi Masyarakat Dalam Sistem Keuangan Nasional

Sanusi Ghazali Pane<sup>1</sup> Anggitha Aulia Harahap<sup>2</sup> Ikuti Daeli<sup>3</sup> Rara Dena Suganda<sup>4</sup> Rizka Fazria<sup>5</sup>

Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Paca Budi, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [sanusi.gazali.pane@gmail.com](mailto:sanusi.gazali.pane@gmail.com)<sup>1</sup>

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap tingkat tabungan dan investasi masyarakat dalam sistem keuangan nasional Indonesia. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis data dan temuan dari berbagai sumber terpercaya. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan berkorelasi positif dengan pertumbuhan jumlah rekening tabungan dan investor di pasar modal. Teknologi finansial (fintech) berperan sebagai katalisator dalam mempercepat inklusi keuangan, meskipun tantangan seperti kesenjangan digital masih perlu diatasi. Program terintegrasi yang menggabungkan peningkatan literasi dan perluasan akses keuangan terbukti lebih efektif dalam mendorong perilaku finansial positif. Penelitian juga mengungkapkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan berkontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan efektivitas kebijakan moneter dan fiskal. Namun, kesenjangan dalam literasi dan inklusi keuangan masih ada, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok pendapatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya berkelanjutan dan terintegrasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan ekonomi nasional Indonesia.

**Kata Kunci:** Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Tabungan, Investasi, Sistem Keuangan Nasional, Fintech, Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal

## Abstract

*This research examines the influence of financial literacy and financial inclusion on the level of public savings and investment within Indonesia's national financial system. Using a literature review method, this study analyzes data and findings from various reliable sources. Results indicate that improvements in financial literacy and inclusion positively correlate with growth in the number of savings accounts and investors in the capital market. Financial technology (fintech) acts as a catalyst in accelerating financial inclusion, although challenges such as the digital divide still need to be addressed. Integrated programs that combine enhanced literacy and expanded financial access prove more effective in promoting positive financial behavior. The research also reveals that improvements in financial literacy and inclusion contribute positively to the stability of the national financial system, economic growth, and the effectiveness of monetary and fiscal policies. However, gaps in financial literacy and inclusion still exist, particularly between urban and rural areas and among income groups. This study concludes that sustained and integrated efforts to improve financial literacy and inclusion should be a priority in Indonesia's national economic development agenda.*

**Keywords:** Financial Literacy, Financial Inclusion, Savings, Investment, National Financial System, Fintech, Monetary Policy, Fiscal Policy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sistem keuangan yang kuat dan inklusif merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, peran literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi semakin krusial dalam mendorong partisipasi aktif

masyarakat dalam sistem keuangan nasional, khususnya dalam hal tabungan dan investasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, yang berpotensi menghambat optimalisasi tabungan dan investasi masyarakat.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, indeks literasi keuangan Indonesia baru mencapai 38,03%, sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 76,19%. Meskipun terjadi peningkatan dari survei sebelumnya pada tahun 2016, angka ini masih jauh dari target pemerintah untuk mencapai indeks literasi keuangan 90% dan inklusi keuangan 90% pada tahun 2024. Kesenjangan ini berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat tabungan dan investasi masyarakat dalam sistem keuangan formal. Kemudian pada Survei (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 76,9%. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya, mencerminkan upaya pemerintah dan lembaga keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat. Meskipun pencapaian ini patut diapresiasi, namun masih terdapat tantangan besar yang perlu diatasi, terutama terkait dengan disparitas yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Kesenjangan akses layanan keuangan ini terlihat jelas ketika membandingkan data antara daerah perkotaan yang memiliki infrastruktur keuangan lebih maju dengan daerah pedesaan yang masih terbatas. Di wilayah perkotaan, indeks inklusi keuangan bisa mencapai lebih dari 80%, sementara di beberapa daerah pedesaan terpencil, angkanya bahkan kurang dari 50%. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, jarak geografis, dan kurangnya literasi keuangan menjadi penyebab utama kesenjangan ini.

Selain itu, disparitas juga terlihat jelas antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Kelompok berpendapatan tinggi cenderung memiliki akses yang lebih luas ke berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk investasi dan asuransi. Sebaliknya, kelompok berpendapatan rendah seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan keuangan formal, baik karena keterbatasan dana maupun persyaratan yang sulit dipenuhi. Data dari Bank Indonesia semakin memperkuat gambaran tentang tantangan inklusi keuangan di Indonesia. Menurut laporan terbaru, pada tahun 2021, hanya 67% masyarakat Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar sepertiga populasi yang belum terintegrasi ke dalam sistem keuangan formal. Hal ini bukan hanya mencerminkan keterbatasan akses, tetapi juga potensi besar yang belum dimanfaatkan dalam hal mobilisasi tabungan dan penyaluran kredit produktif.

Lebih lanjut, data tersebut juga mengungkapkan adanya kesenjangan gender dalam kepemilikan rekening bank, di mana persentase laki-laki yang memiliki rekening bank lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kesenjangan ini semakin melebar di daerah pedesaan dan kelompok berpendapatan rendah, menunjukkan perlunya strategi inklusi keuangan yang lebih berfokus pada pemberdayaan perempuan dan masyarakat pedesaan. Meskipun tren menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun laju pertumbuhan inklusi keuangan ini masih perlu dipercepat untuk mencapai target pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif secara finansial. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi berbagai hambatan struktural dan kultural yang masih ada, serta memanfaatkan potensi teknologi digital dalam memperluas jangkauan layanan keuangan ke seluruh lapisan masyarakat.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa rasio tabungan terhadap PDB Indonesia pada tahun 2020 hanya sebesar 31,7%, lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara

tetangga seperti Singapura (46,5%) dan Malaysia (33,7%). Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan bahwa jumlah investor pasar modal Indonesia baru mencapai 3,87 juta pada akhir 2020, atau sekitar 1,4% dari total populasi. Selanjutnya Rasio tabungan domestik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021 menurun menjadi 29,3%. Namun, tingkat investasi masyarakat masih relatif rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 3,6% masyarakat Indonesia yang berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti saham, reksadana, atau obligasi pada tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 54,9% masyarakat Indonesia memiliki tabungan, namun hanya 17,9% yang berinvestasi pada produk keuangan formal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki tabungan, mereka belum sepenuhnya memanfaatkan produk-produk investasi yang tersedia di pasar keuangan. Literasi keuangan, sebagai pemahaman dan kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi, memiliki peran penting dalam membentuk perilaku keuangan yang positif. Lusardi dan Mitchell (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa individu dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih mampu merencanakan masa depan keuangan mereka, termasuk dalam hal menabung dan berinvestasi. Sementara itu, inklusi keuangan yang mengacu pada akses dan penggunaan layanan keuangan formal, menjadi prasyarat penting bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam sistem keuangan.

Hubungan antara literasi keuangan, inklusi keuangan, dan tingkat tabungan serta investasi telah menjadi fokus berbagai penelitian. Grohmann et al. (2018) menemukan bahwa literasi keuangan memiliki dampak positif terhadap penggunaan produk keuangan formal, termasuk tabungan dan investasi. Selanjutnya, Allen et al. (2016) menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan (inklusi keuangan) berkorelasi positif dengan peningkatan tingkat tabungan nasional. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan demografis berupa bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Memaksimalkan potensi tabungan dan investasi dari kelompok usia produktif ini menjadi krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menyiapkan dana pensiun bagi masa depan. Selain itu, pandemi COVID-19 telah menggarisbawahi pentingnya kesiapan finansial masyarakat dalam menghadapi guncangan ekonomi. Literasi keuangan yang baik dan akses terhadap layanan keuangan formal dapat membantu masyarakat dalam mengelola risiko keuangan dan membangun ketahanan ekonomi. Berdasarkan urgensi dan kesenjangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap tingkat tabungan dan investasi masyarakat dalam sistem keuangan nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan menabung dan berinvestasi, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional.

### **Tinjauan Pustaka**

Sistem keuangan merupakan fondasi vital dalam struktur perekonomian suatu negara, berperan sebagai urat nadi yang mengalirkan dana ke seluruh sektor ekonomi. Soemitra (2009) mendefinisikan sistem keuangan sebagai tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Definisi ini diperkuat dan diperluas oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014, yang menyatakan bahwa sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan

pembiayaan perekonomian. Sistem keuangan yang stabil memerlukan kerja sama yang erat antar komponen-komponennya. Mahardika (2015) mengidentifikasi tiga komponen utama sistem keuangan: lembaga keuangan, lembaga pengawasan dan pendukung, serta infrastruktur keuangan. Masing-masing komponen ini memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan efisiensi sistem keuangan secara keseluruhan. Lembaga keuangan, sebagai komponen pertama, memainkan peran sentral dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai bentuk. Kasmir (2015) menjelaskan bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, baik dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya. Lembaga-lembaga ini mencakup beragam entitas dengan fungsi spesifik dalam sistem keuangan, seperti:

1. Bank Komersial: Menghimpun dana masyarakat melalui giro, tabungan, dan deposito, serta menyalurkannya dalam bentuk kredit.
2. Reksa Dana: Menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual unit penyertaan dan menginvestasikannya dalam aset keuangan.
3. Perusahaan Asuransi: Mengumpulkan premi dari masyarakat dan menginvestasikannya dalam aset keuangan dan riil.
4. Pengelola Dana Pensiun: Menghimpun iuran pensiun dan menginvestasikannya untuk memberikan manfaat pensiun di masa depan.
5. Perusahaan Gadai: Memberikan pembiayaan dengan jaminan aset riil bergerak.
6. Perusahaan Pembiayaan: Menyediakan pembiayaan dengan beragam skema seperti leasing dan factoring.
7. Perusahaan Modal Ventura: Memberikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan saham, terutama untuk usaha yang sulit mendapatkan akses ke pembiayaan bank.

Komponen kedua, lembaga pengawasan dan pendukung, memiliki peran vital dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan. Mahardika (2015) menguraikan lima fungsi utama lembaga ini:

1. Fungsi pengawasan: Melakukan audit secara rutin terhadap lembaga keuangan.
2. Fungsi penetapan standar: Menetapkan standar minimum permodalan dan kualifikasi pengelolaan lembaga keuangan.
3. Fungsi penjaminan: Memberikan bantuan kepada lembaga keuangan yang mengalami gangguan operasional.
4. Fungsi penegakan aturan: Mengenakan sanksi atau denda atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan.
5. Fungsi penilaian: Menetapkan peringkat yang menggambarkan kondisi lembaga keuangan.

Infrastruktur keuangan, sebagai komponen ketiga, mencakup teknologi informasi, perangkat hukum, dan sarana perdagangan yang mendukung operasional sistem keuangan. Mahardika (2015) menjelaskan beberapa contoh infrastruktur keuangan yang krusial:

1. BI-RTGS (Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement): Sistem yang dibangun oleh Bank Indonesia untuk transfer dana rupiah antar bank dalam jumlah besar secara real-time.
2. ATM (Anjungan Tunai Mandiri): Mesin yang menyediakan jasa perbankan secara terbatas.
3. IDI (Informasi Debitur Individual): Pusat informasi mengenai status debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan.
4. E-Trading: Layanan untuk bertransaksi saham di pasar modal melalui komputer atau smartphone.
5. Internet Banking: Layanan transaksi perbankan secara online yang dapat diakses melalui komputer atau smartphone.

Dalam konteks sistem keuangan, tabungan memainkan peran penting sebagai salah satu bentuk simpanan masyarakat. Kasmir (2014) mendefinisikan tabungan sebagai simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah, menggunakan berbagai sarana seperti slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. Dalam perspektif ekonomi makro, tabungan didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan disposabel yang tidak digunakan untuk konsumsi. Tabungan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci:

1. Pendapatan: Memiliki korelasi positif dengan tabungan, di mana peningkatan pendapatan cenderung meningkatkan kemampuan menabung.
2. Konsumsi: Tingkat konsumsi yang tinggi dapat mengurangi porsi pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan. Pola hidup konsumtif sering menjadi tantangan dalam meningkatkan tingkat tabungan masyarakat.
3. Suku Bunga: Meskipun bukan faktor utama bagi sebagian besar masyarakat, suku bunga dapat menjadi insentif tambahan untuk menabung. Namun, motivasi utama masyarakat untuk menabung sering kali lebih terkait dengan persiapan masa depan dan berjaga-jaga.

Investasi, sebagai aspek integral dari sistem keuangan, memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Tandelilin (2010) mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Jogiyanto (2013) memperluas pemahaman ini dengan menjelaskan investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Investasi dapat dilakukan pada berbagai jenis aset:

1. Aset Real: Meliputi tanah, emas, properti, dan aset fisik lainnya.
2. Aset Finansial: Mencakup deposito, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya.

Jogiyanto (2013) mengklasifikasikan investasi keuangan menjadi dua tipe utama:

1. Investasi Langsung: Melibatkan pembelian aktiva keuangan secara langsung dari perusahaan, baik melalui perantara atau cara lain. Ini dapat mencakup pembelian instrumen pasar uang seperti tabungan bank atau sertifikat deposito.
2. Investasi Tidak Langsung: Dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang memiliki portofolio aktiva keuangan dari perusahaan lain.

Tujuan utama investasi, menurut Tandelilin (2010), adalah meningkatkan kesejahteraan investor. Ini dapat dicapai melalui beberapa cara:

1. Mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang: Investasi memungkinkan seseorang untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan tingkat pendapatannya di masa depan.
2. Mengurangi tekanan inflasi: Dengan berinvestasi, seseorang dapat melindungi nilai kekayaannya dari penurunan akibat inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak: Beberapa negara memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu.

Proses investasi, sebagaimana diuraikan oleh Zubir (2011) dan Tandelilin (2010), melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis:

1. Menentukan kebijakan investasi: Investor menetapkan tujuan investasi dan jumlah dana yang akan diinvestasikan, dengan mempertimbangkan potensi risiko dan kerugian.



2. Analisis sekuritas: Dapat dilakukan melalui analisis teknikal atau fundamental untuk mengevaluasi potensi investasi.
3. Pembentukan portofolio: Melibatkan pemilihan sekuritas spesifik dan alokasi dana untuk masing-masing sekuritas.
4. Revisi portofolio: Investor melakukan penyesuaian terhadap portofolio yang ada berdasarkan perubahan kondisi pasar atau tujuan investasi.
5. Evaluasi kinerja portofolio: Investor menilai performa investasinya baik dari segi return maupun risiko.

Pemahaman yang mendalam tentang sistem keuangan, tabungan, dan investasi sangat penting dalam konteks pengelolaan keuangan pribadi maupun kebijakan ekonomi nasional. Sistem keuangan yang stabil dan efisien, didukung oleh praktik tabungan yang baik dan kegiatan investasi yang produktif, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, baik individu maupun pembuat kebijakan perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konsep-konsep ini untuk membuat keputusan finansial yang tepat dan merancang regulasi yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sistem keuangan terus mengalami evolusi. Inovasi dalam produk dan layanan keuangan, seperti fintech dan cryptocurrency, membawa tantangan dan peluang baru dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang terus diperbarui tentang dinamika sistem keuangan, tabungan, dan investasi menjadi semakin penting untuk navigasi yang sukses dalam lanskap keuangan yang terus berubah.

## **METODE PENELITIAN**

Arikunto (2010, hlm 203) menerangkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, sedangkan Alwasilah (2009, hlm149) mengungkapkan bahwa “metode penelitian merupakan alat atau cara untuk menjawab pertanyaan penelitian”. Dengan demikian metode penelitian merupakan cara atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab serangkain pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Literatur review merupakan ikhtisar komperehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahuitentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide peneliti selanjutnya (Denney dan Tewekbury). Studi Literatur bisa didapa dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasu, internet, dan pustaka, Metode studi literatur adalah serangkaian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengelola bahan penulisan ( Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016), Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan.

## **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

### **Peran Inklusi Keuangan dalam Meningkatkan Partisipasi Investasi Masyarakat**

Inklusi keuangan memainkan peran krusial dalam meningkatkan partisipasi investasi masyarakat. Studi oleh Demirgüç-Kunt et al. (2018) menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal berkorelasi positif dengan tingkat investasi masyarakat. Di Indonesia, peningkatan indeks inklusi keuangan dari 67,8% pada 2016 menjadi 76,19% pada 2019 (OJK, 2019) diikuti dengan peningkatan jumlah investor di pasar modal dari 894.116 menjadi

2.484.354 pada periode yang sama (KSEI, 2019). Akses terhadap rekening bank menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai produk investasi. Bank Dunia (2021) melaporkan bahwa individu dengan rekening bank 40% lebih mungkin untuk berinvestasi dibandingkan mereka yang tidak memiliki rekening. Di Indonesia, program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) telah berhasil meningkatkan kepemilikan rekening di daerah terpencil, yang berpotensi membuka akses investasi bagi masyarakat pedesaan.

### **Pengaruh Teknologi Finansial (Fintech) terhadap Inklusi Keuangan dan Investasi**

Perkembangan fintech telah menjadi katalis dalam mempercepat inklusi keuangan dan partisipasi investasi. Penelitian oleh Frost et al. (2019) menunjukkan bahwa fintech dapat mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan transaksi, dan memperluas akses layanan keuangan. Di Indonesia, pertumbuhan pesat industri fintech, dengan 362 perusahaan terdaftar per Desember 2021 (OJK, 2022), telah membuka peluang investasi bagi segmen masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Platform investasi berbasis aplikasi seperti Bibit, Bareksa, dan Ajaib telah berhasil menurunkan hambatan masuk bagi investor pemula. Data dari OJK menunjukkan peningkatan signifikan jumlah investor ritel, dengan pertumbuhan 56% pada 2020 menjadi 3,87 juta investor. Fenomena ini menggambarkan bagaimana fintech dapat menjembatani kesenjangan inklusi keuangan dan meningkatkan partisipasi investasi.

### **Kendala dan Tantangan Inklusi Keuangan dalam Mendorong Investasi**

Meskipun terdapat perkembangan positif, masih ada beberapa kendala dan tantangan dalam mengoptimalkan peran inklusi keuangan untuk mendorong investasi:

1. Kesenjangan Digital: Meskipun fintech memperluas akses, kesenjangan digital masih menjadi hambatan. BPS (2021) melaporkan bahwa penetrasi internet di Indonesia baru mencapai 73,7%, dengan kesenjangan signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
2. Literasi Keuangan: Peningkatan akses tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Survei OJK (2019) menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia hanya 38,03%, yang dapat menghambat pengambilan keputusan investasi yang tepat.
3. Kepercayaan dan Keamanan: Maraknya investasi ilegal dan penipuan keuangan menjadi tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat. OJK mencatat 2.406 investasi ilegal sepanjang 2020-2021, yang dapat mengurangi minat investasi.
4. Regulasi: Kerangka regulasi yang adaptif diperlukan untuk mengimbangi inovasi fintech sambil melindungi konsumen. Tantangannya adalah menciptakan regulasi yang mendukung inovasi tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan.
5. Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, masih menjadi hambatan dalam pemerataan akses layanan keuangan dan investasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan pelaku industri fintech. Strategi yang dapat diimplementasikan meliputi:

1. Peningkatan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil.
2. Penguatan program edukasi keuangan yang terintegrasi dengan produk dan layanan keuangan.
3. Pengembangan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap inovasi fintech.
4. Penguatan sistem keamanan dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, inklusi keuangan diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong partisipasi investasi masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan finansial yang lebih merata.

### **Sinergi Literasi dan Inklusi Keuangan dalam Meningkatkan Tabungan dan Investasi**

Literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki hubungan yang saling menguatkan dalam mendorong peningkatan tabungan dan investasi masyarakat. Studi oleh Grohmann et al. (2018) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat inklusi keuangan yang lebih baik, yang pada gilirannya berdampak positif pada tingkat tabungan dan investasi nasional. Di Indonesia, OJK (2019) melaporkan bahwa individu dengan literasi keuangan yang baik memiliki probabilitas 1,5 kali lebih tinggi untuk memiliki tabungan dan 2 kali lebih tinggi untuk berinvestasi dibandingkan mereka dengan literasi keuangan rendah. Sementara itu, peningkatan akses layanan keuangan melalui program inklusi keuangan telah meningkatkan jumlah rekening tabungan sebesar 13% dan partisipasi investasi sebesar 8% dalam tiga tahun terakhir. Sinergi ini terlihat jelas ketika program edukasi keuangan diintegrasikan dengan inisiatif perluasan akses layanan keuangan. Misalnya, program "Simpanan Pelajar" yang menggabungkan edukasi keuangan di sekolah dengan pembukaan rekening tabungan telah berhasil meningkatkan jumlah pelajar yang menabung dari 1,2 juta pada 2015 menjadi 26,5 juta pada 2021 (Kemendikbud, 2021).

### **Analisis Kesenjangan: Literasi Tinggi vs Inklusi Rendah dan Sebaliknya**

Meskipun literasi dan inklusi keuangan saling terkait, terdapat fenomena menarik di mana terjadi kesenjangan antara keduanya:

1. Literasi Tinggi, Inklusi Rendah: Beberapa daerah perkotaan di Indonesia menunjukkan tingkat literasi keuangan yang relatif tinggi (di atas 40%) namun dengan tingkat inklusi yang lebih rendah. Fenomena ini sering terjadi di kalangan mahasiswa dan profesional muda yang memiliki pengetahuan keuangan namun terbatas dalam akses produk keuangan formal karena persyaratan yang ketat atau kurangnya riwayat kredit. Studi oleh Universitas Indonesia (2020) menemukan bahwa 35% mahasiswa dengan literasi keuangan tinggi tidak memiliki akses ke produk investasi karena batasan minimal investasi yang tinggi.
2. Inklusi Tinggi, Literasi Rendah: Sebaliknya, beberapa daerah, terutama yang menjadi target program perluasan akses keuangan, menunjukkan tingkat inklusi yang lebih tinggi dibandingkan literasi. Contohnya, program Laku Pandai telah meningkatkan kepemilikan rekening di daerah pedesaan, namun survey OJK (2019) menunjukkan bahwa 40% pemilik rekening baru ini memiliki pemahaman terbatas tentang produk keuangan yang mereka gunakan. Hal ini dapat menyebabkan underutilisasi layanan keuangan atau bahkan risiko kesalahan pengelolaan keuangan.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi antara peningkatan literasi dan perluasan akses keuangan.

### **Best Practices: Program Terintegrasi Literasi dan Inklusi Keuangan**

Beberapa praktik terbaik dalam mengintegrasikan literasi dan inklusi keuangan telah menunjukkan hasil yang menjanjikan:

1. Program "SimPel" (Simpanan Pelajar): Inisiatif kolaborasi antara OJK, perbankan, dan sekolah ini menggabungkan edukasi keuangan dengan pembukaan rekening tabungan untuk pelajar. Hasilnya, selain peningkatan jumlah pelajar yang menabung, juga terjadi peningkatan pemahaman keuangan sebesar 25% di kalangan peserta program (OJK, 2021).



2. Fintech untuk Edukasi dan Akses: Platform seperti Amarnya tidak hanya menyediakan akses pinjaman mikro bagi perempuan di pedesaan, tetapi juga memberikan pelatihan keuangan digital. Hasilnya, 80% peminjam melaporkan peningkatan literasi keuangan dan 60% mulai menabung secara teratur (Amarnya, 2020).
3. Program "Keluarga Sadar Keuangan" (KESAKTI): Inisiatif Bank Indonesia ini mengintegrasikan edukasi keuangan dengan akses layanan keuangan digital untuk keluarga prasejahtera. Program ini telah meningkatkan literasi keuangan sebesar 30% dan partisipasi dalam tabungan digital sebesar 45% di kalangan peserta (Bank Indonesia, 2021).
4. Kolaborasi Fintech dan Lembaga Pendidikan: Kerjasama antara platform investasi seperti Bibit dengan universitas untuk memberikan akses investasi reksa dana sambil memberikan edukasi keuangan telah meningkatkan partisipasi investasi mahasiswa sebesar 200% dalam setahun (Bibit, 2021).

Praktik-praktik terbaik ini menunjukkan bahwa pendekatan terintegrasi yang menggabungkan peningkatan literasi dengan perluasan akses keuangan dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan tabungan dan investasi masyarakat. Kesimpulannya, interaksi antara literasi dan inklusi keuangan merupakan faktor kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan menabung dan berinvestasi. Mengatasi kesenjangan antara keduanya dan mengimplementasikan program terintegrasi yang memadukan edukasi dengan akses layanan keuangan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat secara menyeluruh.

### **Dampak Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap Sistem Keuangan Nasional**

Literasi dan inklusi keuangan memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Menurut studi Bank for International Settlements (BIS, 2020), negara-negara dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih tinggi cenderung memiliki sistem keuangan yang lebih stabil. Di Indonesia, peningkatan literasi keuangan telah berkontribusi pada pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik oleh masyarakat. OJK (2021) melaporkan bahwa masyarakat dengan literasi keuangan yang baik 30% lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam skema investasi ilegal atau Ponzi. Hal ini mengurangi risiko sistemik yang dapat timbul dari keruntuhan skema keuangan ilegal. Inklusi keuangan juga berperan dalam meningkatkan stabilitas dengan memperluas basis nasabah bank. Bank Indonesia (2022) mencatat bahwa peningkatan inklusi keuangan telah menurunkan volatilitas simpanan bank sebesar 15% dalam lima tahun terakhir. Diversifikasi basis nasabah ini mengurangi risiko penarikan dana besar-besaran (bank run) yang dapat mengancam stabilitas sistem perbankan. Lebih lanjut, peningkatan literasi dan inklusi keuangan telah mendorong penggunaan produk keuangan formal, mengurangi ketergantungan pada sektor informal yang tidak teregulasi. Hal ini meningkatkan efektivitas pengawasan dan regulasi oleh otoritas keuangan, sehingga memperkuat kerangka stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

### **Peran dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi**

Literasi dan inklusi keuangan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme:

1. Mobilisasi Tabungan: Peningkatan literasi dan inklusi keuangan telah meningkatkan tingkat tabungan nasional. Bank Indonesia (2022) melaporkan bahwa rasio tabungan terhadap PDB meningkat dari 31,7% pada 2017 menjadi 34,5% pada 2021. Peningkatan tabungan ini menyediakan sumber dana yang lebih besar untuk investasi produktif.

2. Alokasi Sumber Daya yang Efisien: Masyarakat yang melek finansial cenderung mengalokasikan sumber daya keuangan mereka secara lebih efisien. Studi oleh LPEM UI (2021) menunjukkan bahwa UKM dengan literasi keuangan yang baik memiliki produktivitas 25% lebih tinggi dibandingkan yang kurang literasi.
3. Inklusi Keuangan dan Pengentasan Kemiskinan: Akses terhadap layanan keuangan formal telah membantu mengentaskan kemiskinan. World Bank (2021) melaporkan bahwa peningkatan inklusi keuangan di Indonesia telah berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,7% per tahun sejak 2016.
4. Peningkatan Investasi: Literasi dan inklusi keuangan telah mendorong partisipasi masyarakat dalam pasar modal. KSEI (2022) mencatat peningkatan jumlah investor ritel sebesar 92,99% dari 2019 ke 2021, mencapai 7,48 juta investor. Hal ini meningkatkan likuiditas pasar modal dan mendukung pendanaan jangka panjang bagi perusahaan.

### **Implikasi bagi Kebijakan Moneter dan Fiskal**

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan memiliki implikasi penting bagi efektivitas kebijakan moneter dan fiskal:

1. Transmisi Kebijakan Moneter: Literasi dan inklusi keuangan yang lebih baik meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap perubahan suku bunga. Penelitian Bank Indonesia (2021) menunjukkan bahwa elastisitas permintaan kredit terhadap perubahan suku bunga meningkat 20% pada kelompok dengan literasi keuangan tinggi. Hal ini meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi permintaan agregat.
2. Stabilitas Harga: Masyarakat yang melek finansial cenderung memiliki ekspektasi inflasi yang lebih terjangkau. Survei OJK (2022) menemukan bahwa individu dengan literasi keuangan tinggi memiliki ekspektasi inflasi yang lebih mendekati target Bank Indonesia. Hal ini membantu bank sentral dalam mengelola ekspektasi inflasi dan mencapai target stabilitas harga.
3. Efektivitas Kebijakan Fiskal: Inklusi keuangan yang lebih luas memfasilitasi implementasi kebijakan fiskal yang lebih efisien. Misalnya, penyaluran bantuan sosial melalui transfer bank telah meningkatkan akurasi dan mengurangi kebocoran. Kementerian Sosial (2021) melaporkan peningkatan efisiensi penyaluran bantuan sebesar 30% sejak implementasi sistem transfer bank.
4. Pengelolaan Utang Publik: Peningkatan literasi keuangan telah memperluas basis investor domestik untuk surat utang pemerintah. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (2022) melaporkan peningkatan kepemilikan surat utang negara oleh investor ritel sebesar 215% dari 2019 ke 2021. Hal ini mengurangi ketergantungan pada investor asing dan meningkatkan stabilitas pembiayaan pemerintah.
5. Inklusi Pajak: Inklusi keuangan yang lebih luas memfasilitasi perluasan basis pajak. Direktorat Jenderal Pajak (2022) melaporkan peningkatan jumlah wajib pajak sebesar 12% sejak implementasi program inklusi keuangan nasional, meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Kesimpulannya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan memiliki dampak multidimensi terhadap sistem keuangan nasional. Selain berkontribusi pada stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi, hal ini juga meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan fiskal. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan perlu berkolaborasi dalam merancang dan mengimplementasikan strategi komprehensif untuk memaksimalkan manfaat dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki peran krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam kegiatan menabung dan berinvestasi. Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan telah berkorelasi positif dengan pertumbuhan jumlah rekening tabungan dan investor di pasar modal. Teknologi finansial (fintech) telah menjadi katalisator penting dalam mempercepat inklusi keuangan, meskipun tantangan seperti kesenjangan digital masih perlu diatasi. Sinergi antara literasi dan inklusi keuangan terbukti lebih efektif dalam mendorong perilaku finansial positif, dengan program-program terintegrasi menunjukkan hasil yang menjanjikan. Peningkatan kedua aspek ini juga berkontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan efektivitas kebijakan moneter dan fiskal. Namun, kesenjangan dalam literasi dan inklusi keuangan masih ada, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok pendapatan, menunjukkan perlunya strategi yang lebih targeted dan inklusif. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan potensi literasi dan inklusi keuangan. Kesimpulannya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan faktor kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas finansial yang produktif, yang pada gilirannya berkontribusi pada penguatan sistem keuangan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dan terintegrasi untuk meningkatkan kedua aspek ini harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan ekonomi nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, F., Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., & Peria, M. S. M. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1-30.
- Amartha. (2020). Laporan Tahunan 2020: Memberdayakan Melalui Teknologi Keuangan. Jakarta: PT Amartha Mikro Fintek.
- Bakhri, Syaeful, Mabruri Fauzi, and Watuniah Watuniah. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019): 286–295.
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Program Keluarga Sadar Keuangan (KESAKTI). Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2022). Statistik Sistem Keuangan Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bibit. (2021). Laporan Perkembangan Investasi Mahasiswa 2021. Jakarta: PT Bibit Tumbuh Bersama.
- Bodie, C. Dan Crane, D. B. 1997 *Personal Investing: Advice, Theory, and Evidence*. *Financial Analysts Journal*.
- Daft, R. L. (2020). *Era Baru Manajemen* (9th ed.). Jakarta : Salemba Empat.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ermawati, N., Khotimah, T., & Nindyasari, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Studi Kasus Pada UMKM Batik Tulis Lasem. *Prosiding SENDI\_U 2019*, 547–552.
- Ermawati, N., Khotimah, T., & Nindyasari, R. (2020). An Analysis of Financial Feasibility on the Batik Tulis Lasem " SR ". *Enrichment: Journal of Management*, 11(1), 173–176.
- Ermawati, N., Khotimah, T., Nindyasari, R., & Hidayanti, A. N. (2020). *Sistem Interaktif Kelayakan Finansial Batik Tulis Lasem* (1st ed.). Universitas Muria Kudus.

- Fabozzi, F. J., & Drake, P. P. (2015). *Capital Markets, Financial Management, and Investment Management*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
- Horne, J. C. Van, & Wachowicz Jr, J. M. (2019). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan* (13th ed.). Jakarta : Salemba Empat.
- Lembaga Pemingkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pub. L. No. 37/SEOJK.03/2016 (2016).
- Made, A. (2020). *Manajemen Investasi Dan Portofolio*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS). ISBN : 978-623-7376-46-0.
- Manki, G.2006. *Principle of Economics ( Tabungan, Investasi, dan Sistem Keuangan)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maulidiana, Lina. "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 102–120. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/442#>.
- Mulyawan, S. (2017). *Manajemen Keuangan*. In 1-48. Pustaka Setia. Mulyawan, S. (2017). *Manajemen Keuangan*. In Pustaka Seribu. Pustaka Seribu.
- Murdadi, Bambang. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan." *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2012): 32–46. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/716>.
- Nanik, E., & Retno, T. H. (2021). *Manajemen Keuangan dan Investasi*. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus. ISBN : 978-623-7312-59-8.
- Ningsih, E (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Di Sumatra Barat. *Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi vol.1 no.1*
- Rivai, H. Veithzal, Andria Permata Veithzal, and Ferry N. Idroes. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Samuelson dan Nordhaus. 2004. *Ilmu Makroekonomi*. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Sari, Annisa Arifka. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia." *Supremasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 23–33. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>.
- Sinaga, Rebekka Dosma, Bismar Nasution, and Mahmul Siregar. "Sistem Koordinasi Antar Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 2 (2013): 1–8.
- Soemitro, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syukron, Ali. "Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2012): 22–41. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/784/549>